

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 2014, *Modul Tugas dan Fungsi DJBC, DTSD Kepabeanan dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, Jakarta,
- Absar, Muhamad. Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014
- Achir, M.N. Azmy, 1975, *Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis*, C.V. Yulianti, Bandung
- Adam, Charles, 2001, *For Good and Evil, The Impact of Taxes on the Course of Civilization*, Madison Book, New York.
- Agustina, Rosa. Suharnoko, Han Nieuwenhuis, Jaap Hijma, 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Seri Unsur-Undur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Pustaka Larasan. Denpasar
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi, Wiratni, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Wajib pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apriliawati, Yeti; Setiawan. Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Anggara, Sahya, 2016, *Hukum Administrasi perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asmara, Galang, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Assiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2010, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Badrulzaman, Mariam. dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan. Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cetakan ke duapuluh tiga. Bandung: Refika Aditama.
- Budiharjo, Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta. .
- Burg, David F. 2004, *A World History of Tax Rebellions, An Ecyclopedia of Tax Rebels, Revolts, and Riots From Antiquity to the Present*, Roulledge, New Yorks.
- Direktorat Teknis Kepabeanan, DJBC, *Materi sosialisasi BTKI 2017*, disampaikan di Auditorium Merauke kantor Pusat DJBC, pada tanggal 2 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1999, *WTO, World Trade Organisation, Menuju Perdagangan Masa Depan*, Jakarta.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2013, *Dasar-dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia*,
- Direktorat Penyuluhan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2018, *Informasi APBN 2018, Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan*.
- Firman, Ade. 2013. *Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam Penanganan Piutang Negara Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.
- Firmansyah, M. Zein, 2016, *Modul Tanggung Jawab Badan Usaha Terhadap Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Bunga*, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khosim 2009, Nusa Media, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya bakti, Bandung.

- , 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gwardzińska, Ewa. "The Role Of Customs Brokers In Facilitating International Trade". *World Customs Journal*. Volume 8, Number 1. March 2014.
- Hanafiah, Firman Sane, 2016, *Modul Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, DTSS Jurusita*, Pusdiklat Bea Dan Cukai. Jakarta,
- Harahap, M. Yahya 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alunmi, Bandung,
- Hart, H.L.A1997, *Konsep Hukum*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung
- Hartono, Sunaryati, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan kedua 1988, Binacipta, Binacipta, Bandung.
- Hernojo, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Holmes, Stephen & Cass R Sunstein, 1999, *The Cost of Rights, Why Liberty Depends on Taxes*, W.W.ton &Company, New York
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Perss, Yogya.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johny, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia. Malang.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jumhana, Asep, 2014, *Administrasi Penagihan Pajak*, Pusdiklat Pajak, BPPK, Jakarta Budi Nugroho, 2014, *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak Tahun 2013*, Kajian Akademis BPPK, Jakarta.
- Kaman, Novyan; Abdulah Zainie; Eddy Abdulrahman; Muhammad Zein, 1996, *Proses Lahirnya Undang-Undang Kepabeanan Dan Cukai (Undang-Undang Nomor 10 Dan 11 Tahun 1995)*, Yayasan Bangun Citra. Jakarta,

Kansil, C.S.T, 2000, *Jilid I Pengantar Ilmu Hukum, Semester Ganjil*, Cetakan kesebelas, Balai Pustaka, Jakarta.

----- 2000, *Jilid II Pengantar Ilmu Hukum, Semester Genap*, Cetakan kesebelas, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelsen, Han 2006, *General Theory of Law & State, With a New Introduction by A. Javier Revino*, Transaction Publisher, New Jersey.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta  
Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Lamb, Margaret Andrew Lymer, Judit Freedman, and Simon James, 2004, *Taxation, An Interdisciplinary Approach to Research*, Oxford University Press, New York.

Lambert. Peter J., 2004. Income Taxation and Equity, *Baltic Journal of Economics*, 4:2, 39-54, DOI: 10.1080/1406099X.2004.10840410.

Latumeten, Pieter E., Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (2017): 1-37

Leback, Karen 1986, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Penerjemah: Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung.

M.D., Moh. Mahfud, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,

Marbun, S.F.. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. FH UII Press, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Perpajakan. Edisi Revisi.*, Andi, Yogyakarta.

Marwanto, 2009, *Kebijakan Penganggaran dan Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan manusia di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.

Mercuro, Nicholas & Steven G. Medema, 1999, *Economic and The Law, From Posner to Post Modernism*, Princeton University Press, UK.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lyberty, Yogyakarta

- , 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Montesquieu, 1977, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Penerjemah M. Khiril Anam, Nusa Media, Bandung.
- Murni, “Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2012,
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Pasaribu, Debora, “Analisis Ekonomi Dari Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No. 1, Juli 2006.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2017, *Buku II, Nota Keuangan Beserta Rancangan APBN Perubahan Tahun 2017*.
- Pitlo, A., 1968, *Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa
- Posner, Richard A. 2011, *The Crisis Of Capitalist Democracy*, Harvard University Press
- Prasetyo Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Prins, W.F. & R. Kosim Adisaputra, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha negara*, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Sumur, Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat. Jakarta.
- , 2009, *Pengadilan pajak dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Purnomo. 2016. *Modul Penatausahaan Piutang, DTSS Juru Sita*. Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta,
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Pemerintah dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, DH UII Press
- , 2014, *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Riyanto, Edi Slamet, 2009, *Pajak Negara, Demokrasi dan Konsep Implementasinya di Indonesia*, Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Rokhim, Abdul, Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Dinamika Hukum*, FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013.
- Rousseau, Jean-Jacques, 1994, *Discourse on Political Economy and The Social Contract, Translated with an Introduction and Notes by Chritopher Betts*, Oxford University Press, New York.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salim, 2011, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Sanyoto, Warsito. 2010. *Implementasi Prinsip Dasar Asuransi pada Polis Asuransi Kerugian dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Tertanggung dan Peranan Pialang Asuransi*. Disertasi. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Edisi III, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simatupang, Mangasa, 2015, *Modul Konsep Dasar Manajemen Risiko*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.



- Smith, Adam 1998, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, The Electric Book Co., London.
- Soehino, 2000, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1977, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- , 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Eresco. Bandung.
- , 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Edisi Revisi, Eresco, Bandung.
- , 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Eresco. Bandung.
- Soeparno, 2012, *Hukum Pajak, Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang.
- Stringham, Edward “Kaldor-Hicks Efficiency And The Problem Of Central Planning“, *The Quarterly Journal Of Austrian Economics*, Vol. 4, no. 2, Summer 2001.
- Suandy, Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta,
- Suarda, I Gede Widhiana, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Banyumedia, Malang.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang
- Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Sugiyanto, Fajar, 2013, *Buku Hukum, Economic Approach to Law, Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W., 2006. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. FH UGM. Yogyakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sunarno, 2012, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2007, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Supriyatna, Endang, 2009. *Tinjauan Yuridis atas Sinkronisasi Vertikal dan Asas Keadilan dari Perantara Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, Terhadap Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2007*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.
- Surach Winarni. 2005. *Hubungan Hukum antara Issuing Bank dengan Pemohon yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter of Credit sebagai Jaminan dan Perlindungan Hukumnya*. Disertasi. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Sutardi. 2016. *Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 dan undang-undang Nomor 17 tahun 2006*. Khazanah Mimbar Plus. Jakarta.
- Syaifudin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Tjandra, Riawan, 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- , 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,
- Utomo, Taufiq. Rachmad Safa'at, Hendarto Hadisuryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa*, Jurnal Hukum, 2017, diperoleh dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2149> diakses pada 5 Maret 2018.
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan ke-4.
- Van der Burght, 2012, *Buku tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan; Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta
- Yuwono, Robertus Waskito. 2006. *Perlindungan Hukum bagi Agent Jasa Perantara Properti (broker Properti) dalam status Eksklusif Listing*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Naskah Asli

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Dasar sementara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 Mei 2014.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612).

Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3686)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tentang Registrasi Importir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor sebagaimana diubah dengan 225/Pmk.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tatacara Penagihan Bea masuk dan/atau Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.04/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 tentang Importir Jalur Prioritas.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 1/BC/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-42/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-17/BC/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 Tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 08/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 05/Bc/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 105/BC/2014 tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### BAHAN DARI INTERNET

*Laws of Malaysia Act 762, Goods and Services Tax Act 2014* diakses dari <http://www.customs.gov.my/en>

*Laws Of Malaysia Reprint Act 235 Customs Act 1967* diakses dari <http://www.customs.gov.my/en>

FAQ Kementerian Perdagangan, diperoleh dari <http://www.kemendag.go.id/id/faq#h-3>, diakses pada 24 September 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, diperoleh dari <https://kbbi.web.id/utang> diakses pada 23 November 2017

Kementerian Keuangan, *Pokok-pokok APBN 2017*, diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/APBN2017lama> diakses pada 18 September 2017 pukul 16.30

OECD, *Tax Administration 2013*, diperoleh dari [https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013\\_9789264200814-en#page182](https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013_9789264200814-en#page182) diakses pada 9 maret 2018 jam 11.30

Peran PP-INSW Sesuai Amanat Perpres 76/2014 Dan Paket Kebijakan Ekonomi, Bahan Sosialisasi di Hotel Sahid Jakarta, 17 November 2016. Diakses dari <https://www.insw.go.id/public/>

Spicker, Paul. 1988. *Principles of Social Welfare An Introduction To Thinking About The Welfare State*. Available online from: <http://www.spicker.uk/books/Paul%20Spicker%20-%20Principles%20of%20Social%20Welfare.pdf>. diakses pada 1 Desember 2016.

WCO, *The Revised Kyoto Convention*, diperoleh dari [http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions.pf\\_revised\\_koto\\_conv.aspx](http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions.pf_revised_koto_conv.aspx). Diakses pada 1 Januari 2018.

WTO, *The WTO in Brief*, diperoleh dari [https://www.wto.org/english/thewtoe/whatis\\_e/inbiref\\_e/inbr00\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewtoe/whatis_e/inbiref_e/inbr00_e.htm) diakses pada 1 Januari 2018.